

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Pelatihan Pertanian Lampung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Raden Gunawan Hajimena
Kotak Pos 8 Unila Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, Januari 2020

Kepala Balai Pelatihan
Pertanian Lampung,



(Dadan Sunarsa, SP., MM.)
NIP. 19620715 199803 1 001

	Hal	
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan Laporan Keuangan		1
I. Laporan Realisasi Anggaran		3
II. Neraca		4
III. Laporan Operasional		5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas		6
V. Catatan atas Laporan Keuangan		7
A. Penjelasan Umum		7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran		15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca		23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional		29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas		37
F. Pengungkapan Penting Lainnya		39
Lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, Januari 2020

**Kepala Balai Pelatihan
Pertanian Lampung,**



(Dadan Sunarsa, SP., MM.)
NIP. 19620715 199803 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp144,056,567.00 atau mencapai 124.19% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp116,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp12,646,963,636.00 atau mencapai 97.99% dari alokasi anggaran sebesar Rp12,905,970,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp143,245,394,694.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp22,155,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp143,064,223,909.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp159,015,785.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15,347,844.00,- dan Rp143,230,046,850.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp74,874,805.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13,710,507,972.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-13,635,633,167.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp69,181,762.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-13,566,451,405.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp144,312,792,596.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-13,566,451,405.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-19,204,410.00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12,502,907,069.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp143,230,046,850.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	116,000,000.00	144,056,567.00	124.19	1,074,105,222.00
Jumlah Pendapatan		116,000,000.00	144,056,567.00	124.19	1,074,105,222.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4,368,796,000.00	4,204,268,584.00	96.23	4,071,315,599.00
Belanja Barang	B.4.	8,163,315,000.00	8,069,574,052.00	98.85	7,629,654,968.00
Belanja Modal	B.5.	373,859,000.00	373,121,000.00	99.80	1,607,673,000.00
Jumlah Belanja		12,905,970,000.00	12,646,963,636.00	97.99	13,308,643,567.00

II. NERACA

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	22,155,000.00	22,155,000.00
Jumlah Aset Lancar		22,155,000.00	22,155,000.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	123,490,215,000.00	123,490,215,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10,771,805,302.00	10,538,176,302.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	18,123,748,000.00	18,307,610,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1,227,646,000.00	1,227,646,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	74,700,000.00	74,700,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-10,623,890,393.00	-9,345,620,240.00
Jumlah Aset Tetap		143,064,223,909.00	144,292,727,062.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	323,354,000.00	492,000.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-164,338,215.00	-492,000.00
Jumlah Aset Lainnya		159,015,785.00	0.00
Jumlah Aset		143,245,394,694.00	144,314,882,062.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	15.347.844	2,086,466.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.347.844	2,086,466.00
Jumlah Kewajiban		15.347.844	2,086,466.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	143,230,046,850.00	144,312,795,596.00
Jumlah Ekuitas		143,230,046,850.00	144,312,795,596.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		143,245,394,694.00	144,314,882,062.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	74,874,805.00	1,058,044,178.00
JUMLAH PENDAPATAN		74,874,805.00	1,058,044,178.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4,207,887,362.00	4,073,402,065.00
Beban Persediaan	D.3.	304,900,000.00	255,485,500.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3,574,669,992.00	4,022,595,449.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	633,137,600.00	552,740,500.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	3,446,708,060.00	2,752,129,200.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	119,801,000.00	30,000,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1,423,403,958.00	1,881,026,354.00
JUMLAH BEBAN		13,710,507,972.00	13,567,379,068.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-13,635,633,167.00	-12,509,334,890.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	37,174,328.00	16,061,044.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	33,879,962.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	32,007,434.00	20,000.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		69,181,762.00	-17,798,918.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-13,566,451,405.00	-12,527,133,808.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	144,312,795,596.00	145,768,729,488.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-13,566,451,405.00	-12,527,133,808.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-19,204,410.00	-1,163,338,429.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	-19,204,410.00	-1,163,338,429.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	12,502,907,069.00	12,234,538,345.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	143,230.046.850.00	144,312,795,596.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung merupakan unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di wilayah dengan kedudukan, tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor : 109/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Didalamnya disebutkan bahwa BPP Lampung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. BPP Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

BPP Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan

- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

Visi BPP Lampung adalah " *Terwujudnya Lembaga Diklat yang unggul dan terdepan untuk Menghasilkan SDM yang profesional dalam Mendukung Pembangunan Pertanian – Bio Industri Berkelanjutan* ". Untuk mewujudkan Visi tersebut, BPP mempunyai Misi-Misi yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan;
2. Meningkatkan kualitas program kediklatan berbasis kinerja;
3. Memberikan pelayanan prima kepada aparatur maupun non aparatur subsektor tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah;
4. Mengembangkan program pelatihan inovatif bagi aparatur dan non aparatur berbasis Bio Energi dan Bio Industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan Pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta Produktivitas Instalasi Agribisnis;
6. Memberikan konsultasi Agribisnis Jamur Tiram dan Ubi Kayu;
7. Meningkatkan kerjasama penyelenggaraan diklat dalam negeri dan luar negeri;
8. Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pelatihan dan melakukan pengendalian intern yang akurat dan kredibel;
9. Meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan tani sebagai lembaga ekonomi produktif dan berdaya saing;
10. Meningkatkan kualitas penatausahaan balai yang transparan dan akuntabel.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan Pertanian Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan Pertanian Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pelatihan Pertanian Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	116,000,000.00	116,000,000.00
Jumlah Pendapatan	116,000,000.00	116,000,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,200,000,000.00	4,368,796,000.00
Belanja Barang Operasional	935,511,000.00	957,511,000.00
Belanja Barang Non Operasional	1,924,444,000.00	2,031,319,000.00
Belanja Barang Persediaan	261,500,000.00	304,900,000.00
Belanja Jasa	704,700,000.00	641,040,000.00
Belanja Pemeliharaan	596,710,000.00	633,210,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,398,100,000.00	3,475,335,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	345,000,000.00	120,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550,000,000.00	373,859,000.00
Jumlah Belanja	12,915,965,000.00	12,905,970,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp144,056,567.00 atau mencapai 124.19% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp116,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	32,007,246.00	0.00

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	116,000,000.00	111,950,733.00	96.51
Pendapatan Denda	0.00	98,400.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	188.00	0.00
Jumlah	116,000,000.00	144,056,567.00	124.19

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -86.59% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena menurunnya penggunaan Mess dan Asrama di Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	32,007,246.00	85,083.00	37,518.85
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	111,950,733.00	1,073,515,139.00	-89.57
Pendapatan Denda	98,400.00	0.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	188.00	0.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	505,000.00	-100.00
Jumlah	144,056,567.00	1,074,105,222.00	-86.59

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp12,646,963,636.00 atau 97.99% dari anggaran belanja sebesar Rp12,905,970,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	4,368,796,000.00	4,204,274,657.00	96.23
Belanja Barang	8,163,315,000.00	8,069,574,052.00	98.85
Belanja Modal	373,859,000.00	373,121,000.00	99.80
Total Belanja Kotor	12,905,970,000.00	12,646,969,709.00	97.99
Pengembalian Belanja		-6,073.00	0.00
Total Belanja	12,905,970,000.00	12,646,963,636.00	97.99

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -4.97% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan pengadaan belanja modal yang cukup signifikan di Tahun 2019.
2. Penurunan realisasi belanja pegawai dikarenakan anggaran uang makan yang terlalu banyak sedangkan realisasinya cukup variatif setiap bulannya.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	4,204,268,584.00	4,071,315,599.00	3.27
Belanja Barang	8,069,574,052.00	7,629,654,968.00	5.77
Belanja Modal	373,121,000.00	1,607,673,000.00	-76.79
Total Belanja	12,646,963,636.00	13,308,643,567.00	-4.97

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4,204,268,584.00 dan Rp4,071,315,599.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.27% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan

pegawai di Tahun 2019 sehingga menambah realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan TA. 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,204,274,657.00	4,071,316,423.00	3.27
Jumlah Belanja Kotor	4,204,274,657.00	4,071,316,423.00	3.27
Pengembalian Belanja Pegawai	-6,073.00	-824.00	637.01
Jumlah Belanja	4,204,268,584.00	4,071,315,599.00	3.27

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8,069,574,052.00 dan Rp7,629,654,968.00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 5.77% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri di TA. 2019 serta peningkatan belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang cukup signifikan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	915,767,050.00	741,230,000.00	23.55
Belanja Barang Non Operasional	2,018,504,303.00	2,583,423,400.00	-21.87
Belanja Barang Persediaan	304,900,000.00	255,465,500.00	19.35
Belanja Jasa	630,756,039.00	714,666,368.00	-11.74
Belanja Pemeliharaan	633,137,600.00	552,740,500.00	14.55
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,446,708,060.00	2,752,129,200.00	25.24
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	119,801,000.00	30,000,000.00	299.34
Jumlah Belanja Kotor	8,069,574,052.00	7,629,654,968.00	5.77
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	8,069,574,052.00	7,629,654,968.00	5.77

Penjelasan Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda yaitu belanja akun 526 berupa peralatan dan mesin yang diserahkan kepada 12 P4S senilai Rp119.801.000,- daftar terlampir penerima dan rincian barang sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA BARANG	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Laptop	1	Unit	3.870.000	3.870.000
	P4S Mitra Mandiri Desa Sukapura Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan	LCD Projector	1	Unit	4.860.000	4.860.000
		Printer	1	Unit	1.200.000	1.200.000
						9.930.000
2	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	LCD Projector	1	Unit	4.860.000	4.860.000
	P4S Mitra Tani Mandiri Kel. Sidorejo Kec. Sidorejo Kab. Lampung Tengah	Mesin Penggiling Kacang	1	Unit	4.150.000	4.150.000
		Mesin Steam Listrik	1	Unit	950.000	950.000
						9.960.000
3	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Laptop	1	Unit	6.470.000	6.470.000
	P4S Bumi Alam Purba Desa Kota Raman, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur	Handycam	1	Unit	2.550.000	2.550.000
		Hardisk Eksternal	1	Unit	835.000	835.000
		Pointer Laser	1	Unit	115.000	115.000
						9.970.000
4	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Genset	1	Unit	2.500.000	2.500.000
	P4S Serba Guna Desa Berasan Mulya, Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	LCD Projector	1	Unit	4.860.000	4.860.000
		Kursi plastik	33	Unit	80.000	2.640.000
						10.000.000
5	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Printer	1	Unit	1.850.000	1.850.000
	P4S Metro Lestari Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat Kota Metro	LCD Projector	1	Unit	4.860.000	4.860.000
		Sound system	1	Unit	3.260.000	3.260.000
						9.970.000
6	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Mesin cuci	1	Unit	1.760.000	1.760.000
	P4S Sama Maju Kampung Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Mesin cuci	1	Unit	1.610.000	1.610.000
		Sealer	1	Unit	6.630.000	6.630.000

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2019

						10.000.000
7	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Oven	1	Unit	8.800.000	8.800.000
	P4S Mitra Alam Desa Sukoharjo 1 Kab. Pingsewu	Printer	1	Unit	1.200.000	1.200.000
						10.000.000
8	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	TV LED	1	Unit	3.550.000	3.550.000
	P4S Kabahill Centre Jl. Raya Air Sebakul-Betungan Kec. Pekan Sabtu, Kota Bengkulu	Dispenser	1	Unit	110.000	110.000
		Magic Com	1	Unit	210.000	210.000
		Kursi Tamu	1	Set	3.150.000	3.150.000
		Kursi Bumbu	1	Unit	775.000	775.000
		Kasur	5	Unit	360.000	1.800.000
		Kompom gas	1	Unit	210.000	210.000
		Taabung gas	1	Unit	175.000	175.000
						9.980.000
9	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Genset	1	Unit	5.745.000	5.745.000
	P4S Gading Indah Desa Air Malas Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu	Laptop	1	Unit	4.255.000	4.255.000
						10.000.000
10	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S					
	P4S Karya Tani Kel. Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir	Printer	1	Unit	4.255.000	4.255.000
		Pompa Air	1	Unit	2.265.000	2.265.000
		Pengaman pompa air	1	Unit	1.850.000	1.850.000
		Papan tulis	1	Unit	250.000	250.000
		Bak Karet	5	Unit	276.000	1.380.000
						10.000.000
11	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Laptop	1	unit	4.255.000	4.255.000
	P4S Langkah Maju Desa Gunung Megang Kec. Jarai Kab. Lahat Sumatera Selatan	Meja	6	unit	670.000	4.020.000
		Kursi Napolly	26	unit	66.000	1.716.000
						9.991.000
12	Penguatan P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani P4S	Cultivator	1	Unit	9.670.000	9.670.000

	P4S Daun Hijau Desa Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan	Kursi plastik	6	Unit	55.000	330.000
						10.000.000
			116			119.801.000

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp373,121,000.00 dan Rp1,607,673,000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -76.79% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena penurunan pengadaan belanja modal yang cukup signifikan di TA. 2019.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373,121,000.00	514,323,000.00	-27.45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	1,048,450,000.00	-100.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	44,900,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	373,121,000.00	1,607,673,000.00	-76.79
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	373,121,000.00	1,607,673,000.00	-76.79

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp373,121,000.00 dan Rp514,323,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -27.45% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena penurunan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di TA. 2019.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373,121,000.00	514,323,000.00	-27.45
Jumlah Belanja Kotor	373,121,000.00	514,323,000.00	-27.45
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	373,121,000.00	514,323,000.00	-27.45

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22,155,000.00 dan Rp22,155,000.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Persediaan Lainnya	22,155,000.00	22,155,000.00
Jumlah	22,155,000.00	22,155,000.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp123,490,215,000.00 dan Rp123,490,215,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10,771,805,302.00 dan Rp10,538,176,302.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	10,538,176,302.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	373,121,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-139,000,000.00
Penghapusan	-492,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	10,771,805,302.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-9,046,040,815.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1,725,764,487.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:
Mutasi tambah pembelian peralatan dan mesin yaitu:

KODE	URAIAN	KUANTITAS		NILAI
1	2	3	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN		30	373,121,000
3.04.01.01.999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya		3	15.510.000
3.04.01.06.029	Pengolahan Produk Kering	Buah	2	7.920.000
3.04.01.06.999	Alat Prosesing Lainnya		8	168.350.000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	7.194.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	1	7.480.000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	4	19.932.000
3.06.01.05.047	Kamera Udara	Buah	1	29.975.000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	2	29.920.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	6.930.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	14.960.000
3.13.01.02.003	Sumur Pemboran Air	Buah	1	59.850.000
3.19.01.02.001	Alat Tennis Meja	Buah	1	5.100.000
			30	373,121,000

Mutasi kurang berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp139.000.000 yaitu minibus (3.02.01.02.003) NUP 4 mobil Mitshuishi Kuda B 1763 LQ, penghapusan shearing machine (3.17.01.24.021) NUP 3 senilai Rp492.000,-.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18,123,748,000.00 dan Rp18,307,610,000.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	18,307,610,000.00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	286,679,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-183,862,000.00
Koreksi Pencatatan	-286,679,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	18,123,748,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-1,241,808,939.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	16,881,939,061.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi tambah senilai Rp286.679.000,- berasal dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas (204) asrama permanen (4.01.02.05.001) NUP 8

Mutasi kurang berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya penghentian aset dari penggunaan senilai Rp183.862.000,- yaitu bangunan peternakan/perikanan lainnya (4.01.01.29.999) NUP 2,3 dan 4.

Dan koreksi pencatatan gedung dan bangunan asrama permanen (4.01.02.05.001) NUP 7 senilai Rp286.679.000,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,227,646,000.00 dan Rp1,227,646,000.00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp74,700,000.00 dan Rp74,700,000.00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-10,623,890,393.00 dan Rp-9,345,620,240.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10,771,805,302.00	-9,046,040,815.00	1,725,764,487.00
2.	Gedung dan Bangunan	18,123,748,000.00	-1,241,808,939.00	16,881,939,061.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,227,646,000.00	-14,941,875.00	1,212,704,125.00
4.	Aset Tetap Lainnya	74,700,000.00	0.00	74,700,000.00
Akumulasi Penyusutan		30,197,899,302.00	-10,623,890,393.00	19,574,008,909.00

C.3. ASET LAINNYA

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp323,354,000.00 dan Rp492,000.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pelatihan Pertanian Lampung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	492,000.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	322,862,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	323,354,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-164,338,215.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	159,015,785.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Mutasi tambah reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya senilai Rp322.862.000,- penghentian aset dari penggunaan (401) yaitu Minibus (penumpang 14 orang kebawah) 3.02.01.02.003 NUP 4 senilai Rp139.000.000,- dan gedung bangunan peternakan/peternakan lainnya (4.01.01.29.999) NUP 2,3 dan 4 senilai Rp183.862.000,-

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-164,338,215.00 dan Rp-492,000.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	323,354,000.00	-164,338,215.00	159,015,785.00
Akumulasi Penyusutan		323,354,000.00	-164,338,215.00	159,015,785.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 15.347.844 dan Rp2,086,466.00. Utang kepada

Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	15.347.844	2,086,466.00
Jumlah	15.347.844	2,086,466.00

**Daftar Rincian Hutang Kepada Pihak Ketiga 2019
yang masih Harus di Bayar Tahun 2020**

No	Uraian	Akun	Jumlah
1	Beban Gaji Pokok PNS 2019	511111	2,803,500
2	Beban Tunjangan Suami/Istri	511121	280,350
3	Beban Tunjangan Anak PNS	511122	106,548
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	511124	2,400,000
5	Beban Pembulatan Gaji PNS	511119	832
6	Beban Tunjangan PPH PNS	511125	114,014
7	Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2019	522111	9,642,600
Total			15,347,884

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp143,230,046,850.00 dan Rp144,312,795,596.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp74,874,805.00 dan Rp1,058,044,178.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	98,400.00	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0.00	255,000.00	-100.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0.00	85,083.00	-100.00
Pendapatan Pendidikan Lainnya	0.00	250,000.00	-100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	41,654,000.00	1,050,951,000.00	-96.04
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	28,049,400.00	3,295,000.00	751.27
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,073,005.00	3,208,095.00	58.13
Jumlah	74,874,805.00	1,058,044,178.00	-92.92

Terdapat perbedaan antara nilai pendapatan di Laporan Operasional Semester II TA 2019 senilai Rp. 69,181,762.00 dengan Realisasi Anggaran Pendapatan Semester II TA 2019. Adapun rincian nya sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	LRA Pendapatan	LO	Selisih
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	28,049,400	28,049,400	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	37,174,328	-	37,174,328
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	5,073,005	5,073,005	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	41,654,000	41,654,000	-
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	25,331,750	-	25,331,750
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak lain/Pihak Ketiga	6,675,496	-	6,675,496
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	98,400	98,400	-
425911	Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran yang lalu	188	-	188
	Total	144,056,567	74,874,805	69,181,762

Pada Realisasi Anggaran Pendapatan semua pendapatan dicatat tanpa terkecuali sedangkan pada Laporan Operasional tidak semua pendapatan dicatat sebagai pendapatan tetapi beberapa dicatat sebagai Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional karena terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4,207,887,362.00 dan Rp4,073,402,065.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,016,025,500.00	2,903,010,980.00	3.89
Beban Pembulatan Gaji PNS	39,704.00	40,861.00	-2.83
Beban Tunj. Anak PNS	61,480,734.00	62,246,794.00	-1.23
Beban Tunj. Beras PNS	149,257,620.00	151,357,800.00	-1.39
Beban Tunj. Fungsional PNS	155,450,000.00	158,860,000.00	-2.15
Beban Tunj. PPh PNS	18,585,374.00	7,346,740.00	152.97
Beban Tunj. Struktural PNS	39,060,000.00	33,460,000.00	16.74
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	226,669,430.00	209,468,890.00	8.21
Beban Tunjangan Umum PNS	111,780,000.00	107,135,000.00	4.34
Beban Uang Makan PNS	429,539,000.00	440,475,000.00	-2.48
Jumlah	4,207,887,362.00	4,073,402,065.00	3.30

Terdapat perbedaan antara nilai belanja pegawai di Laporan Operasional Semester II TA 2018 senilai Rp. 3.618.778, dengan realisasi anggaran Semester II TA 2019. Adapun rincian nya sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Akrual	Kas	Selisih
511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,016,025,500	3,014,676,900	1,348,600
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	45,777	45,047	730
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	226,669,430	226,409,430	260,000
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	61,480,734	61,385,300	95,434
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	39,060,000	39,060,000	-
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	155,450,000	153,650,000	1,800,000
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	18,585,374	18,471,360	114,014
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	149,257,620	149,257,620	-
511129	Beban Uang Makan PNS	429,539,000	429,539,000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	111,780,000	111,780,000	-
	Jumlah	4,207,893,435	4,204,274,657	3,618,778

Selisih sebesar Rp. 3.618.778 merupakan selisih utang pihak ketiga berupa kekurangan gaji pegawai pada anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu Rp. 2.086.466 dan Rp. 5.705.244.

Utang pihak ketiga tahun 2018 tentunya akan menambah realisasi anggaran pada belanja pegawai tahun 2019 dikarenakan menggunakan anggaran tahun 2019. Namun utang pihak ketiga tersebut tidak menambah beban pegawai pada tahun 2019 melainkan merupakan beban tahun anggaran yang lalu. Sedangkan Utang pihak ketiga tahun 2019 akan menambah beban pegawai tahun 2019 karena merupakan kewajiban yang harus dibayarkan di tahun berikutnya.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp304,900,000.00 dan Rp255,485,500.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	137,750,000.00	99,605,500.00	38.30
Beban Persediaan konsumsi	164,215,000.00	153,950,000.00	6.67
Beban persediaan lainnya	2,935,000.00	1,930,000.00	52.07
Jumlah	304,900,000.00	255,485,500.00	19.34

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,574,669,992.00 dan Rp4,040,894,850.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1,753,284,303.00	2,379,648,400.00	-26.32
Beban Barang Non Operasional Lainnya	134,780,000.00	44,400,000.00	203.56
Beban Barang Operasional Lainnya	58,800,000.00	0.00	0.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	137,640,000.00	115,780,000.00	18.88
Beban Honor Output Kegiatan	130,440,000.00	159,375,000.00	-18.16
Beban Jasa Profesi	353,890,000.00	370,600,000.00	-4.51
Beban Keperluan Perkantoran	713,087,050.00	615,950,000.00	15.77
Beban Langganan Listrik	248,673,576.00	278,608,715.00	-10.74
Beban Langganan Telepon	1,835,063.00	2,082,735.00	-11.89
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,240,000.00	9,500,000.00	-34.32
Beban Sewa	36,000,000.00	64,950,000.00	-44.57
Jumlah	3,574,669,992.00	4,040,894,850.00	-11.54

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp633,137,600.00 dan Rp552,740,500.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	328,846,500.00	269,454,500.00	22.04
Beban Pemeliharaan Jaringan	35,492,000.00	31,500,000.00	12.67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	268,799,100.00	251,786,000.00	6.76
Jumlah	633,137,600.00	552,740,500.00	14.55

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3,446,708,060.00 dan Rp2,752,129,200.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2,218,272,751.00	1,377,052,200.00	61.09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	647,452,477.00	25,860,600.00	2,403.63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	580,982,832.00	1,349,216,400.00	-56.94
Jumlah	3,446,708,060.00	2,752,129,200.00	25.24

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp119,801,000.00 dan Rp30,000,000.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	119,801,000.00	30,000,000.00	299.34
Jumlah	119,801,000.00	30,000,000.00	299.34

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,423,403,958.00 dan Rp1,881,026,354.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	504,394,313.00	510,451,879.00	-1.19
Beban Penyusutan Irigasi	38,158,702.00	55,752,700.00	-31.56
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	76,205,606.00	76,205,604.00	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	3,238,750.00	2,677,500.00	20.96
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9,938,486.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	791,468,101.00	1,235,938,671.00	-35.96
Jumlah	1,423,403,958.00	1,881,026,354.00	-24.33

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	-33,879,962.00	-100.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	25,331,750.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	6,675,496.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	20,000.00	-100.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	37,174,328.00	16,061,044.00	131.46
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	188.00	0.00	0.00
Jumlah	69,181,762.00	-17,798,918.00	-488.69

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp144,312,795,596.00 dan Rp145,768,729,488.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-13,566,451,405.00 dan Rp-12,527,133,808.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-19,204,410.00 dan Rp-1,163,338,429.00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-19,204,410.00 dan Rp-1,163,338,429.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-19,204,410.00
Gedung dan Bangunan	0.00
Jumlah	-19,204,410.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12,502,907,069.00 dan Rp12,234,538,345.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	12,646,963,636.00
Diterima dari Entitas Lain	-144,056,567.00
Jumlah	12,502,907,069.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-144,056,567.00 sedangkan DKEL sebesar Rp12,646,963,636.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp143,230,046,850.00 dan Rp144,312,795,596.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah Bank BRI A/C 0098.01.001460.30.5 a.n. BPG 017 Balai Pelatihan Pertanian Lampung
2. Revisi DIPA Ke-1 tanggal 08 Januari 2019
3. Revisi DIPA ke-2 tanggal 12 Februari 2019
4. Revisi DIPA ke-3 tanggal 25 Juli 2019
5. Revisi DIPA ke-4 tanggal 30 Agustus 2019
6. Revisi DIPA ke-5 tanggal 09 Oktober 2019
7. Revisi DIPA ke-6 tanggal 11 Nopember 2019